

**IDENTIFIKASI KECAMATAN RAWAN PANGAN  
DAN PENYEBABNYA DI KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI**

Oleh :

**RIYANDHI PRAZA**  
**02114015**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

## " IDENTIFIKASI KECAMATAN RAWAN PANGAN DAN PENYEBABNYA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI"

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "*Identifikasi Kecamatan rawan Pangan dan Penyebabnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai*". Tujuan Untuk 1). Mengidentifikasi sebaran keadaan pangan per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2). Mengidentifikasi penyebab rawan pangan di Kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nazir ( 1999) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara langsung dengan para key informan, sedangkan data sekunder diiperoleh dari publikasi yang dilakukan melalui Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Kecamatan Siberut Utara. Dari 10 indikator yang digunakan dalam penentuan Kecamatan rawan pangan ini ada 7 indikator dominan yang menjadikan Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan rawan pangan, yakni : indeks ketersediaan pangan, indeks penduduk miskin, indeks desa tanpa akses jalan yang memadai, indeks penduduk tanpa akses listrik, indeks umur harapan hidup, indeks berat badan balita di bawah standar dan indeks perempuan buta huruf.

Adapun faktor penyebab Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan rawan pangan adalah karena faktor geografis dari daerah tersebut yang menjadikan pendayagunaan lahan tidak optimal dan mengakibatkan tidak sampai akses berupa kesehatan, jalan dan sebagainya ke masyarakat yang jauh dari Ibukota Kecamatan. Faktor lainnnya adalah faktor Sumberdaya manusianya yang umumnya berkualitas rendah dimana hal ini dikuatkan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang sebagian besar hanya sampai SD saja, sedangkan yang tamat SLTP ke atas jumlahnya hanya 17,6 % dari total jumlah penduduk di sana. dan juga faktor Kebiasaan masyarakat disana yang manjadi penghambat majunya daerah tersebut.

Untuk menanggulangi rawan pangan di Kecamatan Siberut Utara disarankan, 1).Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, 2). Tinjau ulang bantuan bahan pangan berupa beras karena kurang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat, bantuan tersebut mungkin dapat dilaihkan dalam bentuk uang atau berupa pangan sumber protein agar lebih membantu meningkatkan keseimbangan konsumsi (gizi), 3). Peningkatan pemberdayaan kelembagaan / program terkait pangan, gizi dan kesehatan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Memantapkan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana, 2001). Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai arti politis yang negatif bagi penguasa. Sejarah membuktikan bahwa di beberapa negara berkembang krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Purwantini, 2002).

Kelaparan adalah suatu perwujudan yang ekstrim dari peristiwa kerawanan pangan secara berkepanjangan atau tiba-tiba. Kerawanan pangan terjadi bila seseorang kekurangan gizi yang disebabkan tidak tersedianya pangan (secara sementara atau terus menerus), kurangnya akses sosial atau ekonomis terhadap pangan yang cukup, dan atau konsumsi serta penyerapan bahan pangan yang tidak memadai. Rawan pangan dapat merupakan suatu fenomena jangka pendek (sementara) yang timbul karena bencana, atau suatu masalah jangka panjang (kronis) yang disebabkan oleh keterbelakangan kondisi sosial ekonomi yang tidak menguntungkan (Anonim(a), 2004).

Suatu wilayah yang terjamin pangannya pada saat ini dapat menjadi rawan pangan di masa yang akan datang, bila sumber daya alamnya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jaminan pangan pada tingkat makro, dalam hal swasembada pangan di tingkat nasional dan sub-nasional, tidaklah secara otomatis memberikan garansi terhadap jaminan pangan ditingkat rumah tangga dan individu. Oleh karena itu, rawan pangan merupakan suatu isu multi dimensional dan memerlukan tinjauan yang lebih cermat terhadap sekumpulan parameter, melampaui tinjauan hanya terhadap produksi dan ketersediaan pangan.

Belum tercapainya kecukupan pangan di tingkat individu dapat menimbulkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memperoleh pangan yang cukup, yang terjadi karena ketidakstabilan harga, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga, serta ketidakstabilan produksi pangan di wilayah tertentu.

Hal ini menggambarkan bahwa walaupun secara makro tingkat ketahanan pangan nasional memadai, namun secara mikro ketahanan pangan sebagian penduduk di wilayah Indonesia masih rentan. Hal ini apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berdampak pada pembentukan generasi lemah fisik maupun mental di waktu yang akan datang (Suyana, 2003). Kerawanan pangan merupakan masalah multi-dimensional yang mana secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, baik secara sementara maupun lama. Kondisi ini bisa saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi.

Kerawanan pangan di tingkat nasional dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menghasilkan pangan dan padi-padian secara cukup atau akibat ketidakmampuan untuk mengimpor pangan yang memadai. Pada tingkat propinsi, kerawanan pangan dapat disebabkan oleh kurangnya produksi atau distribusi pangan yang memadai ke seluruh pelosok dengan harga yang terjangkau. Kerawanan pangan di tingkat rumah tangga umumnya disebabkan oleh kurangnya kesempatan memperoleh nafkah yang mencukupi serta tingginya harga pangan. Berdasarkan Laporan Kerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI tahun 2004 terlihat pada Propinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2001-2003 mengalami tingkat rawan pangan sebesar 6,67%, pada tahun 2001 angka rawan pangan sebesar 28,57% kemudian pada tahun 2002 terjadi penurunan hingga mencapai 6,67% dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan lagi menjadi 13,33% (Lampiran 1).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebaran daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut : Kecamatan Pagai Utara Selatan merupakan daerah yang sangat tahan pangan, Kecamatan Sipora dan Kecamatan Siberut Selatan adalah Kecamatan yang cukup rawan pangan, Kecamatan Siberut Utara merupakan Kecamatan yang sangat rawan pangan.

Adapun faktor penyebab Kecamatan Siberut Utara menjadi Kecamatan yang paling rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah karena faktor geografis dari daerah tersebut yang menjadikan pendayagunaan lahan tidak optimal dan mengakibatkan tidak sampai akses beupa kesehatan, jalan dan sebagainya ke masyarakat yang jauh dari Ibukota Kecamatan. Faktor lainnya adalah faktor Sumberdaya manusianya yang umumnya berkualitas rendah dimana hal ini dikuatkan dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang sebagian besar hanya sampai SD saja, sedangkan yang tamat SLTP ke atas jumlahnya hanya 17,6 % dari total jumlah penduduk di sana. dan juga faktor Kebiasaan masyarakat di sana yang menjadi penghambat majunya daerah tersebut

#### **5.2. Saran**

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
2. Tinjau ulang bantuan bahan pangan berupa beras karena kurang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat, bantuan tersebut mungkin dapat dialihkan dalam bentuk uang atau berupa pangan sumber protein agar lebih membantu meningkatkan keseimbangan konsumsi (gizi).
3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan / program terkait pangan, gizi dan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B. dan M Husein, 1999. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional*. IPB Press, Bogor
- Anonim (a). 2001. *Rencana Strategis dan Program Kerja Pemantapan Ketahanan Pangan Tahun 2000-2004*. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta
- Anonim (a). 2002. *Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2002*. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Anonim (a). 2004. *Laporan Kinerja Badan Bimas Ketahanan Pangan Tahun 2004*. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Anonim (b). 2002. *Kebijakan Umum Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional*. Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Anonim (c). 2004. *Rencana Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan*. Badan Keahanan Pangan Sumatera Utara, Medan.
- Krisnamurthi, B. 2003. *Keanekaragaman Pangan: Pengalaman 40 Tahun dan Tantangan ke Depan*. [www. http/Jurnal Ekonomi Rakyat. Htm](http://Jurnal Ekonomi Rakyat. Htm).
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Puwantini, Tri B, Mewa Ariani, Yuni Marisa. 2002. *Analisis Kerawanan Pangan Wilayah (Studi Kasus : Nusa Tenggara Timur)*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian, Bogor.
- Saragih, B. 2001. *Suara dari Bogor Membangun Sistem Agribisnis*. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.
- Saragih, B. 2001. *Pembangunan Pertanian 2001-2004*. Departemen Pertanian, Jakarta
- Santoso, P.B. 2005. *Strategi Pengembangan Agribisnis Pangan*. Majalah Pangan Nomor 44/XIV/Januari 2005
- Soekirman, dkk. 2004. *Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, Jakarta